

PEMBERITAAN MEDIA



LULUK'S UPDATE

**EDISI
21 - 27 Oktober 2019**

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**



PERUBAHAN IKLIM

Program Joint Crediting Mechanism (JCM)

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Kemenko Perekonomian, Rizal Edwin Manansang

- Pemerintah secara konsisten mengembangkan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
- Satu langkah yang diupayakan adalah dengan mendorong sektor swasta sebagai pemain utama untuk mengurangi emisi.
- Program Joint Crediting Mechanism (JCM) merupakan wadah untuk upaya tersebut sekaligus bagian dari implementasi kerjasama bilateral ekonomi, teknologi, peningkatan kapasitas, dan investasi antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.
- Implementasi JCM di Indonesia mendapat predikat termaju di antara 17 negara lain yang juga bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, yaitu sebanyak 35 proyek
- JCM Indonesia sudah mempunyai infrastruktur yang lengkap sesuai dengan standar internasional serta mengedepankan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
- Dalam hal transfer teknologi dan peningkatan kapasitas, proyek JCM mampu mendorong beberapa partisipan proyek maupun pihak luar untuk melakukan replikasi teknologi JCM di luar skema JCM.

Mengakses Dana GCF

Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (Lembaga PLH & SDA MUI), Dr. Ir. H. Hayu S. Prabowo

- Berdasarkan data dari Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, kebutuhan dana NDC Indonesia adalah sekitar \$247 miliar atau \$19 miliar/tahun. Namun alokasi anggaran hanya \$5,8 miliar atau sekitar 4,9% dari anggaran.
- Pemerintah Indonesia mendorong usaha yang dapat menutupi kekurangan anggaran tersebut, salah satunya adalah melalui akses dana GCF yang tersedia sebesar \$5,2 miliar, dimana \$1,6 miliar dialokasikan untuk Asia Pasifik.
- Untuk maksud ini maka Indonesia perlu dapat mengajukan proposal proyek-proyek iklim yang baik agar dapat diterima GCF.
- Dan pada 22-24 Oktober 2019 telah dilakukan pelatihan penulisan Concept Note Green Climate Fund (GCF) untuk inisiator 19 proposal yang lolos tahap 3 dari 60 proposal yang diterima.
- Pelatihan ini dilakukan oleh tim National Designated Authority (NDA – GCF) di bawah Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI).

Komitmen Dana Perubahan Iklim Global

- Menteri Keuangan Perancis berkomitmen menambah dana internasional untuk membantu negara-negara miskin mengatasi perubahan iklim
- Dana tersebut mencapai 11 miliar dolar.
- Ini untuk mengisi Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund)
- Hampir setengah jumlah dana itu dijanjikan oleh Perancis, Jerman dan Inggris saja.
- Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menahan 2 miliar dolar dari 3 miliar dolar yang dijanjikan pendahulunya, Barack Obama, telah menjadi penyebab kurangnya dana yang oleh negara-negara lain diupayakan dengan susah payah untuk dipenuhi.

Penanganan Perubahan Iklim Dianggap Dapat Hambat Ekonomi

Manager Kampanye Iklim WALHI, Yuyun Harmono

- negara-negara global serius melihat dampak perubahan iklim karena akan menghambat ekonomi, namun di sini sebaliknya. Upaya penanganan perubahan iklim masih dianggap dapat menghambat ekonomi
- Banyak negara tidak lagi hanya menempatkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran kemajuan sebuah bangsa. Tidak hanya angka yang dihitung, namun juga tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan.
- Narasi ekonomi dan investasi menjadi panglima dalam kemajuan bangsa, namun menegasikan lingkungan tidak boleh terjadi.
- Permasalahannya, di Indonesia, kabut asap masih terjadi dan di tahun 2019 dampaknya menjadi lebih luas dibanding tiga tahun terakhir dan sekitar 223.000 hektare (ha) terjadi di lahan gambut, yang diketahui menghasilkan emisi paling besar saat terbakar.
- Padahal Presiden Jokowi juga tahu jika gambut terbakar susah sekali dipadamkan. Penegakan hukum harus tegas, sanksi administrasi tertinggi yakni pencabutan izin konsesi harus diberikan

Penanganan
Perubahan
Iklim
Dianggap
Dapat
Hambat
Ekonomi

Pengkampanye Energi dan Perkotaan Walhi, Dwi Sawung

- negara-negara global sudah banyak yang mulai meninggalkan energi fosil untuk mengendalikan pemanasan global.
- Namun di Indonesia target pembatasan batu bara 400.000 ton per tahun justru naik dalam RPJM terbaru menjadi 534.000 ton.
- Melihat komposisi menteri di Kabinet Indonesia Maju, dikhawatirkan jika perubahan pemanfaatan energi beralih dari batu bara justru ke gas. Padahal jeda waktu untuk mengatasi perubahan iklim hanya tinggal beberapa tahun lagi.

Donald Trump Mundur dari Paris Agreement

- Presiden AS Donald Trump membenarkan negaranya akan menarik diri dari persetujuan perubahan iklim Paris. Pernyataan itu diumumkannya dalam sebuah konferensi energi di Pittsburgh.
- Donald Trump berdalih kebijakan pro-bahan bakar fosilnya akan menjadikan AS sebagai negara adidaya energi.
- Donald Trump baru bisa memulai proses penarikan AS secara resmi paling cepat tanggal 4 November. Pengunduran diri ini akan berlaku setahun kemudian, sehari setelah pelaksanaan pemilihan presiden AS di tahun 2020.
- Persetujuan Paris telah menyatukan 195 negara untuk memerangi perubahan iklim. Terikat persetujuan ini, AS diharuskan memotong gas rumah kaca hingga 28 persen pada tahun 2025, berdasarkan tingkat emisi 2005. Persetujuan Paris pada 2015 lalu ini ikut disetujui AS yang saat itu dipimpin Barack Obama. Obama setuju AS harus memimpin perubahan iklim karena kontribusi gas rumah kacanya termasuk yang terbesar dibandingkan negara lain.
- Di sisi lain, China yang kini menjadi penghasil emisi terbesar dan India tidak terlalu ditekan untuk menghapus bahan bakar fosilnya. Itu sebabnya Trump merasa negaranya telah diperlakukan dengan tidak adil.

Donald Trump Mundur dari Paris Agreement

"Persetujuan Paris akan menutup produsen AS melalui aturan pembatasan berlebihan, sedangkan produsen asing tetap diizinkan mencemari dan bebas dari hukuman. Kami tidak akan menghukum warga AS sambil memperkaya para pencemar asing. Saya bangga mengatakannya. Inilah yang disebut **'America First (Dahulukan Amerika)'**" Donald Trump

Donald Trump juga berjanji akan mengubah AS menjadi negara adidaya energi. Ia berupaya menyingkirkan undang-undang polusi untuk mengurangi biaya produksi gas, minyak, dan batu bara. Rencana pembersihan lingkungan dari Barack Obama pun dianggapnya sebagai perang melawan sumber daya energi AS.

Sementara itu, Andrew Light, mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS yang membantu menangani Persetujuan Paris di masa pemerintahan Obama, penarikan diri ini akan membuat AS sulit 'bergaul' di ranah internasional.

"Butuh waktu yang tak sebentar untuk 'sembuh' dari rusaknya diplomasi AS ini" Andrew Light

Periode

Kedua

Menteri LHK
Siti Nurbaya

- Siti Nurbaya menjadi salah satu menteri di jajaran pemerintahan Joko Widodo yang dipercayai untuk mengemban tugas dua periode.
- Ia mendapat arahan dan diingatkan terkait defisit neraca berjalan dan lapangan kerja.
- Juga untuk menjaga iklim investasi, prosedur perizinan, termasuk yang telah dirintis Menteri Koordinator Perekonomian dan Sekretaris Kabinet yaitu berkaitan dengan kemudahan dan omnibus law.
- KLHK harus dapat membantu meningkatkan dan mendukung investasi tanpa meninggalkan unsur kelestarian alam. Dan bagian tersebut berarti mengakselerasi program Perhutanan Sosial yang sedang berjalan.
- Juga untuk memperbaiki kondisi lingkungan, kondisi air, merehabilitasi lahan, serta mereboisasi untuk mengurangi bencana alam. Secara spesifik memperbaiki kondisi Danau Toba, Labuan Bajo dan Mandalika serta waduk-waduk yang kering. KLHK menargetkan rehabilitasi hutan dan lahan Indonesia mencapai 375.750 ha di 2019. Sedangkan rehabilitasi yang telah dilaksanakan mencapai 188.630 ha di 2018 dan 200.990 ha di 2017.

Wakil
Menteri
KLHK
Siap
Bekerja

- Alue Dohong dilantik Presiden sebagai salah satu dari 12 wamen di 11 Kementerian
- Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan jika dirinya dan jajaran KLHK cukup gembira dengan kehadiran Wakil Menteri
- mulai minggu depan KLHK sudah akan langsung berlari kencang dalam menjalankan operasional kerja lapangan sebagai implementasi program-program prioritas nasional.

“Minggu depan kita harus sudah lari kencang dengan konsep yang sudah rapi. Hari Selasa sore besok kita akan bahas dengan Dirjen terkait terutama permasalahan tentang percepatan penyelesaian hutan adat termasuk terobosan regulasinya, dll. Demikian seterusnya, dalam sepekan akan dirancang langkah rinci sampai jadwal penyelesaian di lapangan. Juga segera merapikan regulasi-regulasi yang ada di KLHK untuk memenuhi arahan Presiden Jokowi bahwa dalam satu bulan ini sudah ditentukan regulasi apa saja yang harus dirubah atau dirapikan,” Menteri Siti Nurbaya

“Presiden pesan kepada saya kita harus fokus pada rehabilitasi hutan dan lahan, jadi daerah-daerah seperti danau, daerah yang gundul kita prioritaskan untuk direhabilitasi, membangun kebun bibit di daerah-daerah sebagai penunjang upaya kita. Kemudian juga menyangkut pemindahan Ibu Kota Negara, beliau minta bantuan kita pertama soal konsep desain kota berkelanjutan atau green city dan smart city serta juga pendekatan sosialnya, karena beliau tahu saya berasal dari suku Dayak” Wamen Alue Dohong

MASYARAKAT ADAT

Aceh Terapkan Sistem Hukum Adat Tanpa Pengadilan Negeri

- Majelis Adat Aceh (MAA) menetapkan Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah percontohan dalam penerapan sistem hukum adat di setiap desa dalam menyelesaikan persoalan hukum tindak pidana ringan.
- Terdapat 18 perkara yang penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui peradilan adat di desa tanpa harus dilakukan di persidangan Pengadilan Negeri.
- Di antaranya, perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh (ahli waris), perselisihan antarwarga, khalwat (mesum), perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat. indozone Kemudian, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik.
- Selanjutnya, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pencemaran lingkungan (skala ringan), ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), serta perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat-istiadat.
- Nantinya, kepala desa bertindak sebagai majelis hakim dalam sistem peradilan adat ini dan sekretaris desa bertindak sebagai panitera. Sedangkan, unsur lain di desa seperti imam masjid/imam meunasah, tuha peut atau perangkat desa lainnya bertindak sebagai hakim anggota di setiap persidangan atau peradilan adat.
- Dengan pemberlakuan peradilan adat ini, Majelis Adat Aceh berharap setiap persoalan tindak pidana ringan di masyarakat tidak perlu diselesaikan melalui aturan dan mekanisme hukum yang berlaku di Tanah Air.

AMAN

Tagih

Komitmen

Jokowi

Lindungi

Masyarakat
Adat

Abdon Nababan mengingatkan kembali janji enam prioritas melindungi dan memajukan masyarakat adat dalam Nawacita Presiden Joko Widodo di periode pertama pemerintahannya yang belum terpenuhi.

Ada enam prioritas utama untuk melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat yang menjadi komitmen pada periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tidak ada satu pun tercatat telah terpenuhi. Pencapaiannya jauh dari harapan AMAN.

1. meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengakuan, Penghormatan, Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Masyarakat Adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber daya agraria sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
2. komitmen melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang kini sudah masuk pembahasan tahap akhir untuk menjadi undang-undang.
3. memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU Pertanahan dan lain-lain, berjalan sesuai dengan norma-norma Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

AMAN
Tagih
Komitmen
Jokowi
Lindungi
Masyarakat
Adat

4. komitmen mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai Peraturan Perundang-undangan sektoral atas Hak-hak Masyarakat Adat selama ini.
5. pembentukan komisi independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan Pengakuan, Penghormatan, Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Masyarakat Adat ke depan.
6. berkomitmen memastikan penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat berjalan. Khususnya dalam hal mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat untuk dapat ditetapkan menjadi Desa Adat.

AMAN

Tagih

Komitmen

Jokowi

Lindungi

Masyarakat
Adat

Pembahasan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di DPR macet karena Pemerintah sampai periode habis tidak mengirimkan Daftar Isian Masalah (DIM).

Pelaksanaan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 juga sangat lambat. Hasilnya dalam lima tahun ini sangat kecil, tidak sampai 30.000 hektare (ha) dari lebih enam juta ha hutan adat yang pemetaannya sudah AMAN serahkan ke Pemerintah.

Dengan komitmen Presiden Jokowi yang sangat kuat ini terhadap pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat, ditambah jika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri ATR/BPN punya keberpihakan, pengetahuan dan pengalaman dengan persoalan masyarakat adat pasti bisa membantu Presiden menunaikan janji-janjinya.

Sumber Berita

- <https://www.nusantaratv.com/inspirasi/program-jcm-jadi-upaya-pemerintah-kurangi-emisi-karbon>
- <https://www.voaindonesia.com/a/janji-untuk-dana-perubahan-iklim-global-capai-sekitar-11-miliar-dolar/5139108.html>
- <https://www.validnews.id/Walhi--Penanganan-Perubahan-Iklim-Dianggap-Dapat-Hambat-Ekonomi-dCl>
- <https://akurat.co/news/id-827433-read-tak-peduli-perubahan-iklim-donald-trump-mundur-dari-persetujuan-paris>
- <https://tekno.tempo.co/read/1264165/walhi-perubahan-iklim-akan-menghambat-ekonomi/full&view=ok>
- <https://radar-kalbar.com/baca/26/wakil-menteri-klhk-siap-bekerja/>
- <https://minanews.net/mengakses-pendanaan-iklim-green-climate-fund-oleh-hayu-s-prabowo/>
- <https://www.indozone.id/news/RMsDkq/aceh-terapkan-sistem-hukum-adat-tanpa-pengadilan-negeri>.
- <https://www.harianaceh.co.id/2019/10/23/aceh-mulai-terapkan-peradilan-hukum-adat-tanpa-pengadilan-negeri/>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1126255/siti-nurbaya-ditugaskan-tuntaskan-pekerjaan-rumah>



LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

Madani